

## BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

#### 2.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Gambar 2.1. Logo DPR-RI

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang dirujuk pada Gambar 2.1 terbagi menjadi tiga periode besar yang mencakup:

1. Periode Volksraad
2. Periode Masa Perjuangan Kemerdekaan
3. Periode Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (selanjutnya disebut sebagai KNIP)

## **A. Periode Volksraad**

### **A.1 1916: Dibentuknya Indische Staatsregeling**

Melalui Pasal 53-80 Indische Staatsregeling (atau Staatsblad Hindia No. 114 Tahun 1916), ditetapkan bahwa tanggal 16 Desember 1916 (yang kemudian berlaku mulai 1 Agustus 1917) telah terbentuk kekuasaan legislatif dengan nama Volksraad (atau Dewan Rakyat).

### **A.2 1918: Pembentukan dan Pelantikan Volksraad**

Berdasarkan Indische Staatsregeling yang telah dibentuk, Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum, perwakilan pemerintah Belanda membentuk dan melantik Volksraad pada tanggal 18 Mei 1918.

### **A.3 1918: Keanggotaan Awal Volksraad**

Volksraad memiliki satu orang ketua yang diangkat oleh Raja Belanda dan tiga puluh delapan orang anggota, di mana dua puluh anggota tersebut merupakan warga golongan Bumi Putra.

### **A.4 1927: Perubahan Keanggotaan Volksraad**

Volksraad memiliki satu orang ketua yang diangkat oleh Raja Belanda dan lima puluh lima orang anggota, di mana dua puluh lima anggota tersebut merupakan warga golongan Bumi Putra.

### **A.5 1935: Aktivitas Nasionalis dalam Volksraad**

Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia, Mohammad Husni Thamrin sebagai bagian dari kaum nasionalis moderat menggunakan Volksraad. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda menolak Petisi Sutardjo dan Gerakan Indonesia Berparlemen.

### **A.6 1941: Usulan Milisi Pribumi**

Anggota Volksraad mengusulkan pembentukan milisi pribumi untuk menghadapi musuh dari luar negeri di awal Perang Dunia II, namun usulan ditolak

oleh pemerintah. Dilanjutkan oleh 8 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan ke Asia.

1942: Pembubaran Volksraad Tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Belanda mengakhiri penjajahan di Indonesia setelah 350 tahun dan diserahkan kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, yang kemudian menjadi pendanda bahwa Volksraad berakhir.

## **B. Periode Masa Perjuangan Kemerdekaan**

### **B.1 1943: Masa Perjuangan Kemerdekaan**

Pemerintahan militer Jepang melarang seluruh kegiatan politik disaat telah disambut baik oleh rakyat Indonesia. Untuk membangun semangat kemerdekaan rakyat, para pemimpin yang bekerjasama dengan Jepang menggunakan organisasi Tiga-A dan PUTERA.

### **B.2 1943: Pembentukan Tjuo Sangi-in**

Sebagai badan perwakilan, Tjuo Sangi-in dibentuk untuk menjawab pertanyaan dari Saiko Sikikan mengenai usaha untuk memendangkan Perang Asia Timur Raya, meskipun dianggap bukan badan perwakilan Bangsa Indonesia.

### **B.3 1945: Serangan Atom dan Deklarasi Perang Uni Soviet**

Amerika meluncurkan bom *Fat Man* dan *Little Boy* di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Selain itu Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, sehingga menandakan bahwa Jepang akan segera kalah.

### **B.4 1945: Peristiwa Rengasdengklok**

Sukarno-Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum terbawa pengaruh kembali dari Jepang.

### **B.5 1945: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan diadakan di rumah Sukarno (Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta) pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan ini Bangsa

Indonesia telah dinyatakan merdeka.

## **C. Periode KNIP**

### **C.1 1945: Pembentukan KNIP**

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat kemudian dibentuk pada 29 Agustus 1945 dengan anggota sejumlah 137 orang. Dengan ini KNIP dianggap sebagai cikal bakal dari Badan Legislatif Indonesia. Tanggal 29 Agustus kemudian diresmikan sebagai hari jadi DPR-RI.

### **C.2 1945: Sidang Pertama KNIP**

Terbentuklah pimpinan KNIP pada sidang perdana yang terdiri sebagai berikut:

1. Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo
2. Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
3. Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary
4. Wakil Ketua III: Adam Malik.

### **C.3 1945: Pertempuran Surabaya**

Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945, di mana menimbulkan banyaknya korban di Indonesia. Pada tanggal 27 November 1945, KNIP mengeluarkan protes keras kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris pada tanggal 27 November 1945 atas pertempuran ini.

### **C.4 1945-1949: Sidang KNIP**

Sidang KNIP selanjutnya diadakan di Solo (1946), Malang (1947), dan Yogyakarta (1949). Selama perundingan, terjadi banyaknya perselisihan antara pendukung pemerintah dan yang menentang perundingan itu sendiri. Selain itu, kedua perjanjian Indonesia dan Belanda, Perjanjian Linggarjati dan Renville, telah dilanggar oleh Belanda sendiri dengan melaksanakan agresi militer.

#### D. Periode DPR-RI

Berikut merupakan linimasa periode DPR-RI setelah terbentuknya KNIP:

Tabel 2.1. Periode DPR-RI

No	Nama	Periode
1	Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Agustus 1945 – 15 Februari 1950
2	DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)	15 Februari 1950 – 16 Agustus 1950
3	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956
4	DPR hasil Pemilu Pertama	26 Maret 1956 – 22 Juli 1959
5	DPR setelah Dekrit Presiden	22 Juli 1959 – 26 Juni 1960
6	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Juni 1960 – 15 November 1965
7	DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 November 1965 – 19 November 1966
8	DPR GR Orde Baru	19 November 1966 – 28 Oktober 1971
9	DPR hasil Pemilu ke-2	28 Oktober 1971 – 1 Oktober 1977
10	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Oktober 1977 – 1 Oktober 1982
11	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Oktober 1982 – 1 Oktober 1987
12	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Oktober 1987 – 1 Oktober 1992
13	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Oktober 1992 – 1 Oktober 1997
14	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Oktober 1997 – 1 Oktober 1999
15	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Oktober 1999 – 1 Oktober 2004
16	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009
17	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014
18	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019
19	DPR hasil Pemilu ke-12	1 Oktober 2019 – sekarang

Sumber: [1]

#### 2.1.2 Setjen DPR-RI dan PUSTEKINFO



Gambar 2.2. Logo Sekretariat Jenderal DPR-RI

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai "Setjen DPR-RI") yang ditampilkan pada Gambar 2.2 merupakan sebuah kesetrtiatian lembaga yang menjadi salah satu unsur penunjang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, Setjen DPR-RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPR RI, sesuai dengan pernyataan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020.

Setjen DPR-RI membawahi empat Eselon I dan dua Eselon II, antara lain:

1. Eselon I
  - (a) Deputy Bidang Persidangan
  - (b) Deputy Bidang Administrasi
  - (c) Badan Keahlian
  - (d) Inspektorat Utama
2. Eselon II
  - (a) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
  - (b) Pusat Teknologi Informasi



Gambar 2.3. Logo PUSTEKINFO Setjen DPR-RI

Sesuai dengan Gambar 2.3, Pusat Teknologi Informasi (PUSTEKINFO) merupakan departemen eselon 2 di Setjen DPR-RI. Sebelum adanya departemen PUSTEKINFO, terdapat departemen bernama PUSTADIN (Pusat Data dan Informasi), yang bertanggung jawab atas divisi BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi). Namun, karena adanya tekanan dan dorongan untuk meningkatkan kebutuhan teknologi informasi di lingkungan Setjen DPR-RI, langkah strategis diambil dengan memisahkan BDTI dari departemen PUSTADIN.

Dengan demikian, BDTI ditingkatkan statusnya menjadi departemen baru sebagai eselon 2. Departemen baru ini kemudian mengawasi dua bidang kunci, yaitu Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, untuk lebih fokus dalam mengatasi kebutuhan teknologi informasi yang semakin kompleks dan berkembang di lembaga tersebut.[2]



## **2.2 Visi dan Misi Perusahaan**

### **2.2.1 Visi Sekretariat Jenderal DPR-RI**

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

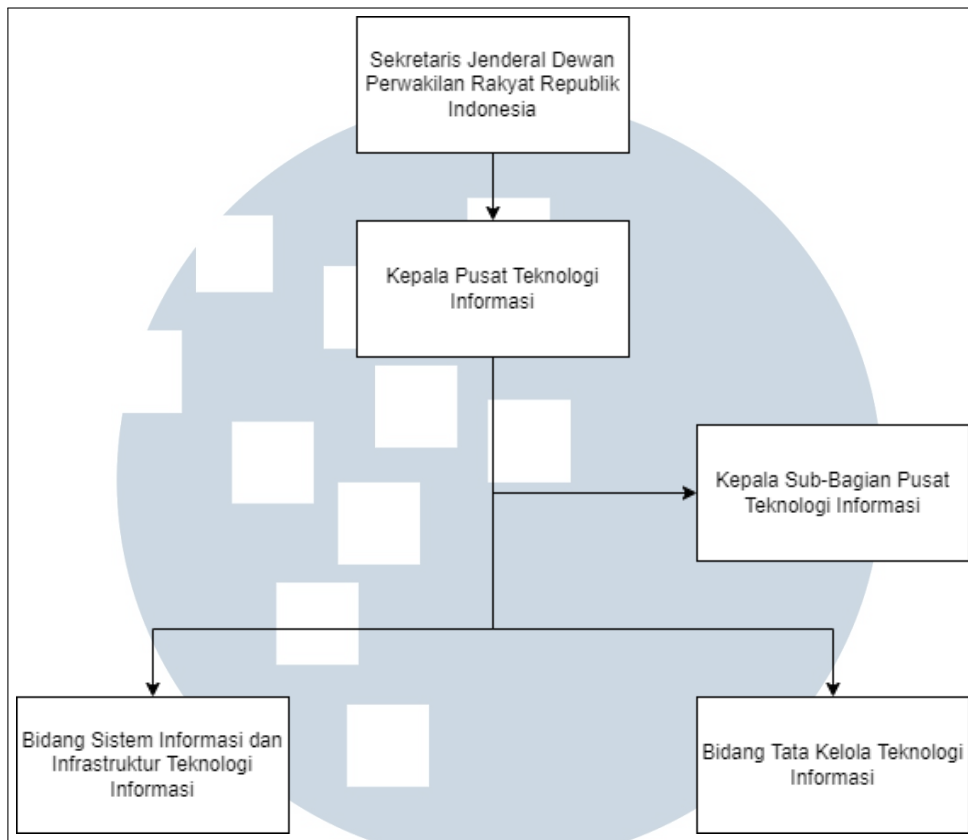
### **2.2.2 Misi Sekretariat Jenderal DPR-RI**

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **2.3 Struktur Organisasi Perusahaan**

Berikut merupakan Gambar 2.4 yang berisi struktur organisasi dari PUSTEKINFO Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 2.4. Struktur organisasi PUSTEKINFO Setjen DPR-RI

Sumber: [3]

